

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang terjadi di Negara Indonesia dan harus di minimalisir untuk menciptakan kesejahteraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014 : 921), Kemiskinan adalah situasi penduduk yang hanya dapat memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan secara minimum. Sehingga secara umum, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah kondisi penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dikarenakan kekurangan dalam segi ekonomi.

Tujuan dari meminimalisir kemiskinan adalah untuk mencapai kesejahteraan yang tentu di inginkan semua masyarakat di negeri ini. Tercapainya kesejahteraan tersebut disertai dengan pelaksanaan pembangunan-pembangunan di seluruh pelosok negeri. Pelaksanaan pembangunan tersebut harus didasari dengan kondisi lapangan yang sebenarnya, karena jika tidak sesuai dengan kondisi lapangan maka tentunya akan menyebabkan ketidak-merataan pembangunan antar daerah. Menurut BPS (1994 :1) dalam bukunya “Statistik Kesejahteraan Indonesia 1994” menyatakan bahwa untuk itu diperlukan data dan informasi misalnya untuk mengevaluasi seberapa jauh sasaran pembangunan telah dapat dicapai, atau untuk memonitor apa saja yang berhasil dilakukan dan apa yang belum dan sebagainya. Selain barang dan jasa yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, data yang lengkap, cermat, tepat waktu dan berkesinambungan merupakan hasil pembangunan yang sangat menentukan kemajuan untuk kedepannya.

Pemerintah telah berupaya dalam menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program. Meskipun kemiskinan belum bisa dikatakan terhapuskan, akan

tetapi penurunan angka kemiskinan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa program-program yang dicanangkan pemerintah dalam usaha penanggulangan kemiskinan ini telah memberikan efek yang positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itulah, perlu adanya suatu informasi berupa data – data yang lengkap dan cermat berisi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) serta kesulitan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan. Dari data – data tersebut pemerintah dapat memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Sasaran yang benar- benar membutuhkan bantuan sehingga dengan pemberian bantuan tersebut dapat melaksanakan pembangunan yang merata di berbagai daerah. Pembangunan ditujukan kepada masyarakat umum diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik lagi.

Salah satu program dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah Nawa Cita yaitu 9 Agenda Prioritas yang salah satunya mengandung tentang perlindungan sosial melalui peningkatan kualitas hidup dengan program-program perlindungan sosial. Perlindungan sosial tersebut tentu ditujukan untuk meminimalisir kemiskinan yang terjadi di negara Indonesia. Program-program tersebut diwujudkan dengan Kartu Perlindungan Sosial / Kartu Keluarga Sejahtera, Bantuan Siswa Miskin / Kartu Indonesia Pintar, Jaminan Kesehatan Nasional / Kartu Indonesia Sehat, Bantuan Beras untuk Rakyat Miskin / Raskin, Program Keluarga Harapan dan lain – lain. Pelaksanaan berbagai program tersebut membutuhkan data dan informasi mengenai Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang akan penerima bantuan dalam bentuk Basis Data yang selanjutnya disebut dengan Pemutakhiran Basis Data Terpadu. Pendataan bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) tentunya akan membantu pemerintah dalam memberikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mendefinisikan

“Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) memuat informasi sosial dan ekonomi rumah tangga individu dengan tingkat kesejahteraan terendah yang digunakan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah.

Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) merupakan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 yang telah menjadi acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)”. (<http://www.tnp2k.go.id/id/data-indikator/pemutakhiran-basis-data-terpadu-pbdt/tentang-pemutakhiran-basis-data-terpadu-pbdt/>) diakses pada tanggal 30 Januari 2017.

Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 lebih banyak menggunakan variabel dibandingkan dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 sebelumnya. Kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) dilakukan dalam rangka menyempurnakan dan memutakhirkan informasi rumah tangga dan individu yang terdapat dalam Basis Data Terpadu

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Badan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappeda Kabupaten Klaten yang beralamat di Jalan Pemuda Gedung Pemda II Lantai II, Kabupaten Klaten terdiri dari empat bidang yaitu Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian dan Evaluasi yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bidang sesuai dengan tugas yang lebih spesifik.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten menjadi lokasi Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Klaten yang merupakan bagian dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan bertugas untuk merencanakan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten, yang mana salah satu tugasnya yaitu melalui Sistem Aplikasi Pemuktahiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 sebagai basis data Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima bantuan dalam mensukseskan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten.

Sistem Aplikasi sudah menjadi sebuah kebutuhan tersendiri bagi suatu perusahaan atau lembaga teknis pemerintahan. Sistem Aplikasi berperan penting dalam memberikan informasi berupa data-data kepada masyarakat. Karena dengan adanya Sistem Aplikasi maka dapat memudahkan pengguna untuk mengakses informasi – informasi yang dibutuhkan. Seperti dalam kegiatannya di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) yang bertugas membuat perencanaan dan pembangunan di tiap daerah Kabupaten Klaten membutuhkan adanya sebuah Sistem Aplikasi. Karena dengan adanya Sistem Aplikasi maka akan memudahkan BAPPEDA dalam mengakses data - data masyarakat di Kabupaten Klaten yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) serta sulit dalam mengakses pendidikan dan kesehatan.

Dengan adanya Sistem Aplikasi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) yang dikenal dengan Sistem Aplikasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 atau PBDT 2015 dapat digunakan untuk memberikan informasi berupa data di daerah mana saja yang masih membutuhkan bantuan pemerintah. Sehingga diharapkan dapat menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan terstruktur agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tidak terjadi peristiwa dimana masyarakat yang merasa layak menerima bantuan namun tidak tercakup (*exclusion error*); namun ada masyarakat yang sebenarnya dinilai tidak layak justru masuk kategori penerima bantuan (*inclusion error*).

Tabel 1.1

Unit Pengguna Sistem Aplikasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun
2015

No	Unit Pengguna
1	Kementerian Dalam Negeri
2	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

3	Kementerian Keuangan
4	Kementerian Sosial
5	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
6	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
7	Dinas Pendidikan
8	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
9	Dinas Kesehatan
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
16	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	Dinas Perhubungan
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
21	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan
23	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten.

Tabel 1.2
Kecamatan di Kabupaten Klaten yang membutuhkan data Pemutakhiran Basis
Data Terpadu

No	Kecamatan
1	Kecamatan Bayat
2	Kecamatan Cawas
3	Kecamatan Ceper
4	Kecamatan Delanggu
5	Kecamatan Gantiwarno
6	Kecamatan Jatinom
7	Kecamatan Jogonalan
8	Kecamatan Juwiring
9	Kecamatan Kalikotes
10	Kecamatan Karanganom
11	Kecamatan Karangdowo
12	Kecamatan Karangnongko
13	Kecamatan Kebonarum
14	Kecamatan Kemalang
15	Kecamatan Klaten Selatan
16	Kecamatan Klaten Tengah
17	Kecamatan Klaten Utara
18	Kecamatan Manisrenggo
19	Kecamatan Ngawen
20	Kecamatan Pedan
21	Kecamatan Polanharjo
22	Kecamatan Prambanan
23	Kecamatan Trucuk.
24	Kecamatan Tulung
25	Kecamatan Wedi
26	Kecamatan Wonosari

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka penulis bermaksud membuat Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Aplikasi Pengolahan Data Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015 Di Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Aplikasi Pengolahan Data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Klaten ?

C. Tujuan Pengamatan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir sebagai berikut :

1. Tujuan Operasional
Untuk mengetahui Sistem Aplikasi Pengolahan Data Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015 di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) di Kabupaten Klaten.
2. Tujuan Fungsional
Pengamatan ini bertujuan agar hasilnya dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, pembaca maupun bagi pihak Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Klaten sendiri, serta masyarakat secara umum dalam memberikan data mengenai Sistem Aplikasi Pengolahan Data Pemutakhiran Basis Data Terpadu.
3. Tujuan Individual
Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh sebutan Ahli Madya pada program Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.

D. Manfaat Pengamatan

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan penulis tentang Sistem Aplikasi Pengolahan Data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 di Bappeda Klaten.

2. Bagi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA)

Dari hasil pengamatan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten diharapkan agar sistem aplikasi tersebut dapat memberikan data yang bermanfaat. Penulisan diharapkan dapat bermanfaat sebagai media publikasi mengenai tugas dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) sebagai Badan Perencana yang menunjang Pengembangan Daerah khususnya Kabupaten Klaten terkait dengan proses pemberian bantuan guna penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten.

3. Bagi Pembaca

Hasil pengamatan diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memahami dan memberikan informasi tentang Sistem Aplikasi Pengolahan Data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 Di Kabupaten Klaten yang telah dilaksanakan.